

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan Keberagaman di Sekolah**

Keberagaman merupakan sebuah keadaan di mana dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa perbedaan seperti misalnya usia, gender, etnis, ras dan kebudayaan. Kondisi ini selanjutnya akan membentuk masyarakat yang majemuk (Kusmaryani, 2006; 51).

Menurut J.S. Furnivall, dalam buku Andri Ashadi masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas maupun kelompok-kelompok yang secara budaya dan ekonomi terpisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya. Karakteristik masyarakat majemuk dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti yang ditulis dalam buku karangan Andri Ashadi yang berjudul *Mutikulturalisme "Berebut Identitas di Ruang Publik"* ada beberapa karakter masyarakat majemuk menurut Nasikun yaitu (Ashadi, 2005: 3):

1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.

4. Secara relatif sering mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain.

Kemajemukan, pada dasarnya adalah sebuah fenomena bebas nilai. Namun tidak jarang keberagaman dipandang sebagai ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara. Muncul segmentasi dan diferensiasi yang tidak dapat dihindari dan dikhawatirkan dapat menyebabkan melemahkan integritas nasional. Ketika kebudayaan dipahami sebagai sesuatu yang mandiri, utuh, murni, dan citra yang akan terbangun adalah pluralitas yang berdiri sendiri dan terpisah. Selanjutnya sikap ini akan mempertahankan keterpisahan budaya. Selanjutnya sikap ini menimbulkan perebutan dominasi. Sikap menghadapi perbedaan dikendalikan oleh kebudayaan mayoritas (Kusmaryani, 2006; 50).

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka kemajemukan mesti dikelola dengan baik. Lembaga pendidikan merupakan salah satu media pengelolaan pendidikan yang strategis. Mengingat ia bisa melakukan program yang berjenjang dan sistemik.

Dalam dunia pendidikan, tema kemajemukan diupayakan dalam pendidikan multikulturalisme. Sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Tilaar pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan

terhadap keragaman etnis dan budaya masyarakat. Pelaksanaan pendidikan multikulturalisme dilakukan dengan empat cara yaitu (Rosyada, 20014; 3—4):

1. Dimensi Kurikulum.

Dalam dimensi ini pendidikan multikultural dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai, norma dan pemahaman yang berkaitan dengan multikultural kedalam mata pelajaran, dengan rumusan dan kompetensi yang jelas, terarah dan terukur.

2. Dimensi Ilmu Pengetahuan.

Didalam dimensi ini, pemahaman, nilai dan norma yang akan disampaikan dirumuskan melalui proses keilmuan.

3. Perlakuan pembelajaran yang adil.

Perlakuan dalam pembelajaran harus disampaikan secara adil. Tanpa membedakan perlakuan terhadap mereka yang berasal dari etnis tertentu.

4. Pemberdayaan budaya sekolah.

Dalam dimensi ini pendidikan multikultural dilakukan melalui *hidden curriculum*. Sekolah harus membiasakan pemberian dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan multikulturalisme, baik dalam penyediaan fasilitas belajar, fasilitas ibadah, layanan administrasi maupun berbagai layanan lainnya.

## **B. Pendidikan Multikultural**

Gagasan pendidikan multikultural berawal dari gerakan Hak-hak Sipil (*Civil Rights Movements*). Gerakan ini pertama kali muncul di Amerika

Serikat pada tahun 1960-an. Gerakan pendidikan multikultural ini merupakan salah satu gerakan reformasi dalam dunia pendidikan yang sangat didominasi golongan mayoritas dan sangat mendiskriminasi terhadap golongan “minoritas”. Di Amerika Serikat pada era 1960-an dunia pendidikan didominasi oleh golongan WMPA (*White-male-protestan-Anglo Saxon*). Reformasi lembaga pendidikan agar member peluang yang sama kepada setiap orang tanpa melihat asal-usul etnis, budaya dan jenis kelamin untuk memperoleh pengetahuan, kecakapan dan sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara-bangsa dan masyarakat dunia yang beragam secara etnis dan budaya (Amirin, 2012; 2).

Salah satu tujuan pendidikan multikultural adalah untuk menekan rasisme dalam dunia pendidikan. Pendidikan multikultural tentu mengupayakan hak-hak sipil demi kebebasan, kekuasaan politik, dan integrasi ekonomi (Baidhawiy, 2005; 7). Latar belakang dari upaya ini adalah pengalaman pahit kelompok-kelompok etnis Afro-Amerika, Primbumi Amerika, Asia-Amerika, dan Latino Amerika yang pernah menjadi korban diskriminasi, bukan hanya dalam kehidupan kemasyarakatan, melainkan juga secara legal kelembagaan (Tatang, 2012; 3).

Diskriminasi di Amerika Serikat digambarkan oleh Banks dengan sulitnya orang kulit berwarna untuk mendapatkan kesetaraan dalam berbagai bidang. Sangat sulit bagi warga diluar WMPA untuk mendapatkan kesetaraan dalam bidang hukum, sosial, dan politik sebagai warga negara Amerika

Serikat. Mereka bisa secara hukum tersisihkan sebagai warga negara, atau jika secara hukum sudah tak masalah, untuk mendapatkan pendidikan tersisih juga, dan jika secara akademik tidak mengalami masalah dalam kehidupan sosial masyarakat tetap mendapatkan perlakuan yang buruk (Amirin, 2012; 3).

Tatang M. Amirin dalam jurnalnya “Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia” menuliskan pendapat James Banks mengenai tujuan gerakan pendidikan multikultural. Ada empat tujuan pendidikan multikultural yaitu (Amirin, 2012; 3):

1. Pertama, membantu individu memahami diri sendiri secara mendalam dengan menggunakan perspektif budaya lain.
2. Memberikan peserta didik pengetahuan mengenai etnis dan budaya-budaya lainnya.
3. Mengurangi efek buruk dari diskriminasi.
4. Membantu peserta didik menguasai kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung.

Pendidikan multikultural mengupayakan keadilan sosial, tentu upaya ini dilakukan dalam jalur pendidikan. Ketidakadilan sosial dalam pendidikan multikultural disebut dengan istilah penindasan yang terlembagakan (*Institutionalized oppression*), pendidikan multikulturalisme mencoba menjadikan komunitas-komunitas tertindas sebagai sumber kekuatan. Pendidikan multikulturalisme ditunjukkan sebagai kritik terhadap upaya-upaya dominasi kaum kulit putih di Amerika Serikat yang mempertahankan dominasinya dalam kegiatan sosial, politik dan ekonomi. Ada pandangan

bahwa orang kulit putih memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berkulit bewarna (Baidhawry, 2005; 7).

Pandangan multikultural tentu, bukanlah upaya awal dari pembentukan gagasan kesetaraan di Amerika Serikat. Sebelum ada pandangan Multikultural J. Hector seorang imigran dari Normandia mengembangkan teori *Melting pot*. Dalam teori ini Hector menekankan penyatuan budaya, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yaitu budaya Amerika, walaupun monokultur tersebut lebih didominasi oleh kultur *White Anglo Saxon Protestan (WAPS)*. Kemudian teori ini dikritik oleh Horace Kallen. Ia menggagas sebuah teori yang disebut *Salad Bowl*. Horace Kallen mengupayakan agar budaya diluar *White Anglo Saxon Protestan (WASP)* diakomodir dengan sebaik-baiknya dan semuanya member kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya Nasional. Namun pola ini masih sangat tertutup di mana semua kebudayaan dianggap mandiri dan interaksi antar budaya sangat kaku. Lalu dikembangkan teori *cultural pluralism*, teori ini menggagas ruang pergerakan menjadi dua. Ruang itu adalah ruang publik dan ruang privat. Pada ruang publik, merupakan tempat untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Sementara itu diruang privat mereka bisa mengaktualisasikan diri dalam budaya etnisitas mereka secara bebas dan leluasa. Dengan berbagai yang berkembang di Amerika berupaya memperkuat

bangsanya. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika Hitam atau Imigran Amerika Latin atau etnik minoritas lainnya, mereka merasa belum terpenuhi hak-hak dasarnya. Atas alasan ini, maka dikembangkan gagasan Multikulturalisme. Gagasan ini menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit. Multikulturalisme pada akhirnya merupakan sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap ini akan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membesarkan sebuah bangsa karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsanya, dan mereka akan bangga dengan kebesaran bangsa itu (Rosyada, 2014; 2).

Di Indonesia, fenomena masyarakat multikultural telah disadari sejak awal bangsa ini didirikan. Indonesai diproklamirkan sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, tujuan itu adalah mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera. Namun gagasan ini pada kenyataannya bukanlah hal yang mudah ditambah lagi dengan politik mono-kultur yang dipakai oleh Soekarno dan Soeharto. Demokrasi terpimpin yang digagas Soekarno telah mengkerdilkan upaya-upaya yang bersifat kedaerahan yang berbasis etnis dan budaya daerah. Hal serupa juga terjadi di masa Soeharto, kuatnya sentralisasi kekuasaan membuat budaya daerah lokal

seolah tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Filsafat *Bhineka Tunggal Ika*, saat itu hanya menjadi slogan tetapi tidak pernah terwujud dalam teori ketatanegaraan, hubungan sosial maupun pranata sosial lainnya. Keadaan ini mulai berubah di era Reformasi, ketika kebebasan berbicara mulai diangkat. Gagasan multikulturalisme mulai mengemuka, dan juga memasuki wilayah pendidikan. Di Indonesia multikulturalisme dijadikan dasar untuk merancang pembelajaran yang berbasis *Bhineka Tunggal Ika*, nilai-nilai multikulturalisme diupayakan dan diintegrasikan melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan didukung pula oleh pendidikan agama (Rosyada, 2014; 3).

Pendidikan multikultural merupakan upaya sistematis dan berjenjang dalam rangka menjembatani kelompok-kelompok etnis, relasi gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, kebudayaan dan sub-kultural, serta bentuk-bentuk lain dari keagamaan yang berbeda dan memiliki potensi untuk melahirkan ketegangan dan konflik (Baidhaw, 2005; 6).

Sebagai kesimpulannya Baidhaw menyimpulkan pendidikan multikulturalisme merupakan cara mengajarkan keberagaman (*teaching diversity*). Pendidikan multikulturalisme menghendaki rasionalisasi etis, intelektual, sosial pragmatis, inklusivisme, pluralisme serta saling menghargai semua orang (Baidhaw, 2005; 8).

### **C. Membina Kerukunan Lewat Pendidikan**

Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan



suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan salah satu upaya penyebaran dan penanaman nilai dan norma, membina kepribadian, mengajarkan pengetahuan, melatih kecakapan dan keterampilan dalam masyarakat. Karena itu sikap yang dipilih oleh anggota masyarakat sangat bergantung pada nilai-nilai yang disebarkan dalam lembaga pendidikan (Sabrini, 2012:1).

Hal ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah lembaga pendidikan dalam penyebaran nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai dan norma dalam tahap selanjutnya tentu akan diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Sistem pendidikan Indonesia yang memungkinkan pihak swasta mengelola pendidikan memungkinkan adanya beragam lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Beragamnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, tentu akan menyebarkan nilai dan norma yang beragam juga.

Secara struktural lembaga pendidikan mengemban tugas untuk mensosialisasikan nilai-nilai kerukunan. Lembaga pendidikan tentu memiliki posisi yang strategis mengingat pendidikan dilakukan secara berjenjang dan sistematis.

Pada era Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyumi hingga Menteri Agama Suryadarma Ali, kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama

yang bersifat normatif dan akademis dilakukan dengan memperkuat pengembangan wawasan multikultural umat beragama. Pengembangan wawasan multikultural ini secara teknis dilakukan melalui pendekatan pendidikan agama yang nuansa *Rahmatan lil Alamin* dan inklusif mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi ( Ahmad, 2013; XVII).



UIN IMAM BONJOL  
PADANG